

Tata Kelola Sumber Daya Keuangan Di SMAN 13 Bandung

Yudi Ruswandi¹, Ahmad Dini², Irwan Sutiawan³

^{1,2,3} STAI Al-Mas'udiyah Sukabumi

Submitted: 11-01-2023

Accepted: 19-01-2023

Published: 11-03-2023

Abstract

This research is motivated by the fact that SMAN 13 Bandung is one of the outstanding educational units. Reflected in several achievements from the principal to the students. In addition, this school has developed into a very qualified school. The purpose of this study is to describe the planning, implementation and financial reporting processes at SMAN 13 Bandung. The research procedure includes pre-field, field and data analysis activities. Data collection techniques consist of: interviews, observation, and documentation studies. The result of this study is that the governance of financial resources has been carried out in accordance with management principles in planning, implementing and reporting on the use of the budget in accordance with applicable regulations. Based on the results of these studies, the conclusion of this study is that SMAN 13 Bandung has realized good financial management. In accordance with the results of the research, the recommendations for this research are: first, schools can confirm school priority programs based on the results of context analysis; second, encouraging the implementation of concrete steps regarding alternative solutions to problems as stated in the Medium Term Activity Plan (RKJM) document.

Keywords: Finance, Financial Resources, Governance, Management

***Corresponding author**

ISSN 2986-5883

yudi@staimas.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan sebuah negara, pembangunan terhadap sumber daya manusia merupakan salah satu yang sangat penting (Eka, 2022). Dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, negara akan tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Namun jika pembangunan terhadap sumber daya manusia itu tersendat, akan berpengaruh sangat signifikan terhadap laju pertumbuhan negara.

Namun untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, perlu strategi jitu dan waktu yang cukup panjang. Selain itu, perlu juga mendapat dukungan sumber daya lain yang harus berjalan beriringan dengan proses pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya lain itu seperti sarana dan prasarana/infrastruktur. Sebagaimana dikemukakan Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia 2004-sekarang) dalam APBN KITA edisi Maret 2019, bahwa berdasarkan pengalamannya bekerja di Bank Dunia, ia melihat setidaknya ada tiga hal yang dimiliki oleh negara maju, yaitu: institusi, *human capital*, dan infrastruktur.

Pentingnya negara memiliki institusi-institusi yang bersih dan berintegritas. Agar tingkat integritasnya tinggi tentu harus diisi oleh sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing. Bangsa Indonesia yang penuh dedikasi terhadap pekerjaannya, ikhlas membaktikan diri dan ilmunya demi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga dalam pandangan Menteri Keuangan Republik Indonesia, investasi yang sangat penting pertama kali adalah investasi terhadap manusia atau disebut dengan istilah *human capital*.

Arah pembangunan yang kedua setelah investasi pada pengembangan sumber daya manusia, adalah membangun infrastruktur yang produktif dan bisa menunjang proses

pengembangan sumber daya manusia. Kedua hal inilah menjadi konsentrasi anggaran negara sampai saat ini.

Mengenai pembangunan sumber daya manusia, sebagaimana amanah konstitusi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>). Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, pada tahun 2009, anggaran pendidikan sudah mencapai 207 triliun rupiah atau sekitar 20,8% dari APBN. Setiap tahun, anggaran pendidikan selalu mengalami peningkatan. Sampai di tahun 2018 anggaran pendidikan mencapai 444,1 triliun.

Anggaran yang sangat besar tersebut diharapkan dapat terus memberikan pelayanan pendidikan yang merata namun berkualitas bagi bangsa Indonesia. Pelayanan pendidikan itu diarahkan mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Program Indonesia pintar sebanyak 19,6 juta jiwa;
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 56 juta jiwa;
3. Beasiswa bidik misi untuk 401,5 ribu mahasiswa;
4. Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas sebanyak 61,2 ribu;
5. Tunjangan profesi guru non PNS sebanyak 435,9 ribu guru, PNS sebanyak 257,2 ribu guru, dan PNS Daerah sebanyak 1,2 juta guru.

Besaran anggaran yang meningkat untuk setiap tahunnya, namun masih belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan. Karena APBN masih terbatas dan belum mampu dibebankan sepenuhnya. Namun, kita mesti juga menyadari bahwa alokasi dan

realisasi anggaran pendidikan setiap tahun yang meningkat, menunjukkan komitmen Pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Maka untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, diperlukan bantuan melalui kerjasama seluruh pihak, baik masyarakat maupun *stakeholders* lainnya yang bisa membantu memenuhi pembiayaan pendidikan. Berdasarkan hasil analisa penyusun di lapangan, hal ini merupakan pekerjaan yang cukup berat dan kompleks. Hal yang paling sulit dirasakan adalah bagaimana memberikan kesadaran pada semua pihak tentang memaksimalkan peran masing-masing sebagaimana diharapkan dan diatur melalui peraturan yang berlaku.

Tantangan saat ini adalah memberikan kesadaran kepada sekolah terutama masyarakat untuk mampu bersama-sama mewujudkan generasi bangsa yang unggul. Kerjasama ini sangat penting, karena dapat meningkatkan partisipasi semua pihak untuk membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju melalui pendidikan.

Kendala-kendala lain yang juga penting yaitu masih adanya persoalan alur birokrasi dan administrasi mulai dari pengajuan bantuan, penggunaan anggaran, sampai pada pelaporan penggunaan anggaran, terutama yang bersumber dari APBN dan APBD. Sedangkan dalam tahap perencanaan, masih adanya satuan pendidikan yang merasa kebingungan tentang bagaimana mekanisme penyusunan dan pembuatan RKAS.

Mengingat beberapa permasalahan di atas, maka sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana tata kelola pengembangan sumber daya keuangan di sekolah. Dengan harapan dapat memberikan kejelasan mengenai aturan pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan naturalistik kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang "...berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan..." (Siyoto and Ali Sodik, 2018). Melalui metode ini, data alamiah diungkap di lokasi penelitian yang berasal dari informan primer maupun sekunder dengan bantuan teknik pengumpulan data. Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Aplikasi dari teknik pengumpulan data di atas, selanjutnya disusun beberapa instrumen penelitian, yaitu: Pedoman Wawancara atau selanjutnya disingkat dengan PW, Pedoman Observasi atau selanjutnya disingkat dengan PO, dan Pedoman Studi Dokumentasi. Instrumen ini kemudian disusun menjadi sebuah matrik yang berisi sumber data, daftar pertanyaan, jawaban dari sumber data, dan makna.

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 13 Bandung. Data-data yang dikumpulkan dan digali melalui bantuan instrumen penelitian, kemudian dianalisis. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *data concluding drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

SMA Negeri 13 Kota Bandung beralamat di Jalan Raya Cibereum Nomor 52, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Kode Pos 40184. Sekolah memiliki visi "Terwujudnya SMA Negeri 13 Bandung, menjadi sekolah BerSeRi (Berprestasi dan Religius) dan Berbudaya Lingkungan tahun 2022. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) misi: 1) meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Mewujudkan lingkungan sekolah

yang sehat, indah, dan nyaman; 3) Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 4) Meningkatkan sarana-prasarana penunjang; 5) Mewujudkan pembelajaran PAIKEMKU (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan, Kompetitif dan Unggul); 6) Meningkatkan pembelajaran berbasis IT; 7) Mengembangkan pembelajaran berbasis bahasa Inggris; 8) Meningkatkan budaya belajar, bekerja, dan disiplin; 9) Mengembangkan potensi, minat dan bakat melalui pengembangan diri' 10) Meningkatkan pembinaan dan keikutsertaan dalam berbagai lomba, baik akademik maupun nonakademik; 11) Mewujudkan pengelolaan sekolah yang transparan, partisipasi, dan akuntabel.

Mekanisme pengelolaan keuangan disesuaikan mulai dari penyusunan Rencana Kegiatan Satuan pendidikan (RKS) yang meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dilaksanakan melalui empat langkah: pertama, analisis konteks; kedua, hasil analisis sebagai bahan penentuan strategi perencanaan; ketiga, strategi perencanaan diwujudkan melalui penyusunan visi dan misi; keempat, dituangkan dalam RKS.

Setelah RKS tersusun dan telah melalui beberapa revisi, selanjutnya dijadikan sebagai rujukan dalam tahap implementasi sesuai dengan jadwal dan biaya yang dianggarkan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam tahap pelaksanaan, perlu didukung oleh semua pihak (warga sekolah), melalui komitmen bersama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Proses pelaporan terdiri dari: Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS regular, Pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat,

Laporan asset, Laporan ke Dinas Pendidikan, dan Laporan Daring ke Laman BOS Reguler.

Pengertian Manajemen Keuangan

Terdapat dua konsep dalam tinjauan tentang definisi manajemen keuangan, yaitu konsep manajemen dan keuangan. Beberapa pakar memberikan pengertian tentang manajemen, diantaranya menurut Ismaya, manajemen itu adalah “Suatu kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain maupun melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi” (Ismaya, 2015). Williams juga menggarisbawahi manajemen itu mencakup kegiatan pembuatan perencanaan dan pembuatan keputusan. Lebih detailnya ia mengungkapkan bahwa “*management involves making plans and decisions about the future needs of the business; management is about making cost-effective use of resources through efficient organization and control; and management is about getting the best of people to achieve objectives*” (Gunawan, 2017).

Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah

Secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 dinyatakan bahwa dana pendidikan itu harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip keadilan dilaksanakan dengan kesesuaian alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan setiap sekolah. Setiap jenjang pendidikan dari mulai yang paling dasar di tingkat PAUD sampai dengan yang paling tinggi pada jenjang perguruan tinggi, tentu akan memiliki kebutuhan anggaran yang berbeda. Sehingga dalam konteks keadilan, tentu bukan dalam

arti menyamakan anggaran tetapi lebih kepada proporsi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah itu.

Sumber Dana Pendidikan

Sumber dana pendidikan diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bahwa dana pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini juga dipertegas kembali dalam Permendikbud Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 3.

Penentuan sumber pendidikan tersebut, didasari oleh tiga prinsip, yaitu: keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa prinsip keadilan itu berarti bahwa “besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing”. Prinsip kecukupan disebutkan dalam ayat (3) yaitu “pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan”. Sedangkan dalam ayat (4) disebutkan tentang prinsip keberlanjutan, bahwa “pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan”.

Sumber pendanaan dari Pemerintah dapat berupa: hibah dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), membayar gaji guru, upaya membantu sekolah dengan mengadakan penggalangan dana dengan menyediakan bantuan teknis termasuk bahan dan perlengkapan, pendanaan pada pembangunan dan rehabilitasi sekolah (Gunawan, 2017). Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program bantuan pendidikan lain untuk setiap sekolah, salah

satunya berupa program hibah atau program lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari masyarakat, pendanaan pendidikan dapat berbentuk sumbangan. Sumbangan yaitu:

“Penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun waktu pemberiannya”.

Perencanaan Tata Kelola Keuangan

Pengelolaan keuangan di SMAN 13 Bandung dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata kelola keuangan yang berlaku. Mekanisme pengelolaannya disesuaikan mulai dari penyusunan Rencana Kegiatan Satuan pendidikan (RKS) yang meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Adapun langkah-langkah penyusunan RKS secara sistematis mengikuti alur sebagai berikut:

1. Menganalisis konteks terhadap delapan standar nasional pendidikan dan satuan pendidikan serta analisis terhadap kondisi lingkungan satuan pendidikan. Analisis terhadap delapan standar pendidikan bertujuan untuk memetakan antara kondisi ideal berdasarkan standar nasional pendidikan dengan kondisi real di satuan pendidikan tersebut. Proses analisis yang baik, akan menghasilkan akurasi data yang tinggi. Data tersebut merupakan data yang akan dijadikan sebagai input untuk membuat RKS. Selain itu, analisis juga dilakukan pada

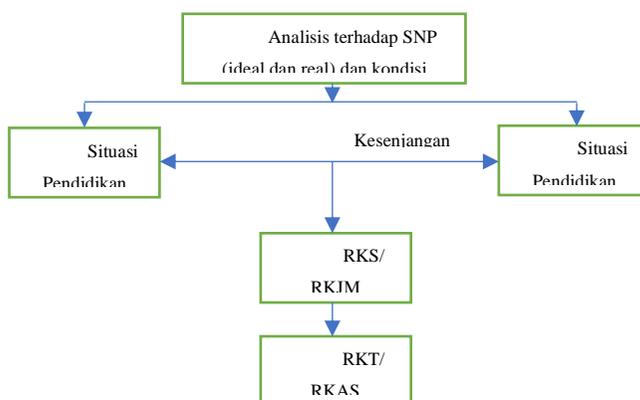
lingkungan satuan pendidikan untuk mengidentifikasi peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang dapat berimplikasi kepada satuan pendidikan.

2. Hasil analisis terhadap kondisi satuan pendidikan dan lingkungan dijadikan sebagai bahan untuk menentukan strategi perencanaan.
3. Strategi perencanaan diwujudkan melalui penyusunan visi, misi, sasaran, dan strategi pengembangan yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan. Unsur-unsur tersebut, selanjutnya dituangkan ke dalam RKS.
4. RKS terwujud dalam RKJM dan RKT/RKAS. RKJM disusun untuk jangka waktu empat tahun. Dimana isinya adalah rincian kegiatan untuk tahun pertama sampai tahun keempat. RKT yang merupakan bagian dari RKJM dijadikan sebagai rujukan untuk menyusun pendanaan kegiatannya yang disebut dengan RKAS.

Untuk memperjelas mekanisme perencanaan keuangan tersebut, penyusun sajikan dalam skema sebagai berikut:

Skema 1

Mekanisme Perencanaan Keuangan di SMAN 13 Bandung



Penyusunan RKS secara keseluruhan berada di bawah kendali kepala sekolah. Kepala sekolah membuat tim khusus perencanaan RKS

yang beranggotakan komite sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, dan perwakilan guru. Tugas dari tim ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan dan mengolah hasil analisis konteks.
2. Mengidentifikasi rencana tindak lanjut.
3. Menentukan skala prioritas.
4. Menentukan rencana kegiatan.
5. Menentukan rencana pembiayaan.
6. Menentukan target capaian
7. Menjabarkan peran dan fungsi personil yang terlibat.
8. Menentukan waktu pelaksanaan.
9. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar.

Hasil analisis konteks yang diperoleh pada penyusunan RKJM 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Sekolah yang berada paling barat kota Bandung yang berbatasan dengan wilayah kota Cimahi.
2. Status kepemilikan tanah masih dalam sengketa dengan pemilik sebenarnya (perorangan).
3. Lingkungan sekolah di pinggir jalan raya provinsi, dan dekat dengan bibir sungai yang mengakibatkan struktur tanah labil dan mempengaruhi terhadap bangunan sekolah.
4. Keberagaman status orang tua siswa, pendidikan, penghasilan, maupun kepada siswa.
5. Tingkat ekonomi orang tua siswa yang amat sangat beragam.
6. Luas tanah dan bangunan yang tidak mungkin untuk perluasan bangunan dan tempat aktifitas para siswa di luar kelas

Berdasarkan hasil tinjauan tentang hasil analisis konteks terutama aspek lingkungan di SMAN 13 Bandung, penyusun berkesimpulan bahwa permasalahan yang menjadi konsentrasi sekolah sampai tahun 2022 adalah permasalahan mengenai sarana prasarana.

Hal ini terlihat dari alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana pada tahun pelajaran 2014/2015 sebesar Rp. 1.214.055.880 (satu milyar dua ratus empat belas juta lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Alokasi anggaran tersebut merupakan alokasi anggaran yang paling besar yaitu sebesar 32% dari total pengeluaran sekolah.

Sampai di RKJM untuk tahun 2018-2022, hasil analisis konteks menunjukkan bahwa persoalan sarana dan prasarana tetap menjadi prioritas utama konsentrasi anggaran. Namun, karena keterbatasan data yang diberikan oleh pihak sekolah, untuk tahun 2018/2019 tidak ada angka pasti sehingga belum dapat dipastikan apakah alokasi anggarannya memiliki persentasi yang sama dengan tahun pelajaran 2014/2015 atau tidak.

Setelah mencermati RKJM 2018-2022 SMAN 13 Bandung, terdapat penjelasan yang bertolak belakang antara ketersediaan anggaran dengan alternatif pemecahan persoalan yang dihadapi. Di bagian hasil analisis SWOT, ketersediaan dana dikatakan cukup, memadai, dan tersedia, namun pada aspek pemecahan masalah justru ditentukan tiga hal yang tidak mencerminkan kecukupan anggaran. Ketiga hal itu adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara menggalang dana dari masyarakat yang tidak mengikat.
2. Mengajukan proposal terkait dengan pemenuhan sarana prasarana ke direktorat dasar dan menengah Kemendikbud RI di Jakarta.
3. Penggalangan dana melalui proyeksi CSR (SMAN 13 Bandung, 2018:20)

Berdasarkan penuturan kepala sekolah, bahwa saat ini di SMAN 13 komite sekolah dalam menjalankan fungsinya masih terbatas pada mengajak orang tua untuk membantu keuangan sekolah dalam

menjalankan program setiap tahun, terutama program untuk pengembangan sarana dan prasarana. Dari data mengenai langkah-langkah strategis dan hasil wawancara kepada kepala sekolah, penyusun berkeyakinan bahwa persoalan kecukupan anggaran masih sangat besar dan belum dalam kondisi memadai.

Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan

Setelah RKS tersusun dan telah melalui beberapa revisi, selanjutnya dijadikan sebagai rujukan dalam tahap implementasi sesuai dengan jadwal dan biaya yang dianggarkan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam tahap pelaksanaan, perlu didukung oleh semua pihak (warga sekolah), melalui komitmen bersama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Di samping itu, warga sekolah juga harus mematuhi segala ketentuan dan kewajiban yang berlaku dengan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kepala sekolah bertugas untuk melakukan pengawasan dan memastikan kegiatan yang sudah direncanakan, dapat berjalan sesuai dengan waktu dan capaian yang ditentukan.

Pelaporan Tata Kelola Keuangan

Pembukuan dan laporan keuangan sekolah, salah satunya mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Dalam Lampiran bab V mengenai Pertanggungjawaban Keuangan, diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah harus membuat pembukuan yang lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana. Pembukuan dan dokumen pendukung tersebut terdiri dari: RKAS, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku

Pembantu Pajak, Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, dan Bukti Pengeluaran.

- a. RKAS. Ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan ketua yayasan (untuk swasta). RKAS dibuat satu kali dalam setahun, namun dapat direvisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di dalamnya juga bisa dilengkapi dengan rencana penggunaan dana yang lebih rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan sesuai dengan sumber dana yang diterima.
- b. BKU. Dalam BKU mencakup semua transaksi eksternal dan internal, baik tunai maupun nontunai. Diisi tiap transaksi, di mana transaksi tersebut juga harus dicatat dalam buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak.
- c. Buku Pembantu Kas. Berisi catatan setiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.
- d. Buku Pembantu Bank. Berisi catatan tiap transaksi melalui bank dalam bentuk cek, giro, atau tunai (ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah).
- e. Buku Pembantu Pajak. Berisi catatan setiap transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.
- f. Opname Kas dan BAP Kas. Tiap kali menjelang penutupan BKU, kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di Sekolah dalam bentuk kas tunai maupun kas yang ada di bank atau rekening Sekolah. Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka kepala

Sekolah dan bendahara menandatangani berita acara pemeriksaan kas.

g. Bukti Pengeluaran.

- 1) Tiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.
- 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai.
- 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
- 4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi.
- 5) Tiap bukti pembayaran harus disetujui kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh bendahara.
- 6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Untuk proses pelaporan terdiri dari:

- a. Realisasi Penggunaan Dana tiap Sumber Dana.
- b. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Bos Reguler.
- c. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- d. Laporan Aset.
- e. Laporan ke Dinas Pendidikan.
- f. Laporan Daring ke Laman BOS Reguler

SIMPULAN

Perencanaan keuangan di SMAN 13 Bandung, melalui mekanisme yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Di mana dimulai dari penyusunan Rencana Kegiatan Satuan pendidikan (RKS) yang meliputi dokumen Rencana Kegiatan Jangka Menengah (RKJM),

Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pelaksanaan tata kelola keuangan di SMAN 13 Bandung, mengacu pada RKAS yang telah disusun dan disahkan oleh Pemerintah dan dapat dilakukan beberapa penyesuaian-penyesuaian melalui kegiatan revisi berdasarkan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan RKAS harus didukung oleh komitmen dan kerjasama yang solid antar seluruh warga sekolah, agar benar-benar dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Pelaporan penggunaan dana mengacu pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan sumber keuangannya. Jika sumber keuangan berasal dari BOS Reguler, maka mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Dalam pelaporan ini terdiri dari: pembukuan, pelaporan, dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiawati, Ety (2017). *"Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan/Sekolah"*. Jurnal FKIP
- Barlian, U.C. (2016). *Manajemen Strategik: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Khalifa Insan Cendekia Press.
- Gaol, J.L. (2015). *Kendalaan dan Sukses Sekretaris Perusahaan dan Organisasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Gunawan, I dan Benty, D.D.N. (2017). *Manajemen Pendidikan: Suatu Pengantar Praktik*. Bandung: Alfabeta
- Ismaya. (2015). *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Katresna. (2011). *Pengelolaan Keuangan Sekolah*. [online]. Tersedia: <https://katresna72.files.wordpress.com/2011/06/3-pengelolaan-keuangan-sekolah.pdf>
- KBBI. (2019). *Keuangan*. [online]. Tersedia: <https://kbbi.kata.web.id/keuangan/>

- Kemenag RI. (2011). Permendikbud Ri Nomor 16 Tahun 2011. [online]. Tersedia: http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_60_11.pdf
- Kemenristekdikti. (2019). Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah 2019. [online]. Tersedia: <https://jdih.kemdikbud.go.id/?service=srv:04.11jdih&ref=3ed11eva7kw92d90ga66bsel0i61490x5p6ce8d6a1513df1f5555bdqc29e3adzffebcc6e7a15e3aa6h5956ffmadteae56ud0d5dj0a1ffb1bb3299o0d3ry1bd94bc7e&task=2036>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia. (2013). *Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: LPPKS
- Sa'ud, U.S dan Makmun, A.S. (2014). *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zonkeu. 2019. [online]. Tersedia: <https://www.zonkeu.com/pengertian-keuangan-menurut-para-ahli/>